

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
INTISARI.....	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Tentang Norma Hukum	20
1. Pengertian Norma Hukum	20
2. Fungsi dan Tujuan Norma Hukum	23
3. Bentuk Norma Hukum.....	24
4. Hierarki Norma Hukum.....	25
B. Tinjauan Hukum Kepailitan.....	27
1. Konsep Kepailitan.....	27
2. Tujuan dan Fungsi Hukum Kepailitan.....	28
3. Asas-Asas Hukum Kepailitan	29
4. Para Pihak Dalam Proses Kepailitan	30
5. Proses Hukum Kepailitan	33
C. Tinjauan Tentang Penyitaan Aset	36
1. Pengertian Penyitaan Aset	36
2. Fungsi dan Tujuan Penyitaan Aset	38
3. Jenis Penyitaan Aset	39
4. Pengaturan Penyitaan Aset	43

D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi	44
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	44
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	46
3. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi.....	47
4. Dampak Tindak Pidana Korupsi.....	50
5. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi	52
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis dan Sifat Penelitian	55
B. Data Penelitian	57
1. Bahan Hukum Primer	58
2. Bahan Hukum Sekunder	58
3. Bahan Hukum Tersier	58
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data.....	59
1. Penelitian Kepustakaan.....	60
2. Wawancara.....	60
D. Subyek Penelitian.....	61
E. Jalannya Penelitian.....	61
1. Tahap Persiapan.....	61
2. Tahap Pelaksanaan.....	62
3. Tahap Penyelesaian.....	62
F. Analisis Data.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Adanya Konflik Norma Hukum Kepailitan Dan Hukum Acara Pidana Terhadap Penyitaan Aset Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	64
1. Penyitaan Aset dalam Norma Hukum Kepailitan.....	65
2. Penyitaan Aset Dalam Norma Hukum Acara Pidana	77
3. Akibat Hukum yang Timbul dari Adanya Konflik Norma Hukum Kepailitan dan Hukum Acara Pidana Terhadap Penyitaan Aset dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	84

B. Pengaturan Penyitaan Aset Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Masa Mendatang Agar Dapat Mencegah Terjadinya Konflik Hukum Kepailitan Dan Hukum Acara Pidana.....	96
1. Pengaturan Penyitaan Aset Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Masa Mendatang Perlu Memperhatikan Klasifikasi Hukum Privat dan Hukum Publik	103
2. Pengaturan Penyitaan Aset Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Masa Mendatang Perlu Memperhatikan Asas Berlakunya Undang-Undang	106
BAB V PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan	121
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123